



Dinamika Masyarakat Teluk Bone di Era Gejolak DI/TII

Fachriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 fachriyadi65@admin.smp.belajar.id

Ahmad Yani

Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Indonesia
 ahmadyani01@iainpare.ac.id

Abstract

This study discusses the DI/TII movement in Bone Bay in 1953-1965 using historical research methods that include heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of the study found that Bone Bay, which connects South Sulawesi and Southeast Sulawesi, became the center of the DI/TII movement because it was driven by demographic factors and historical relations of its population. The involvement of the Bajo tribe in the sea guerrilla in the waters of Bone Bay strengthened the movement. DI/TII's activities are not only limited to the mainland, but also in the waters of Bone Bay, which has led to a series of incidents of obstruction, piracy, and murder of ship crews, as well as a reduction in shipping and trade activities. The impact, such as burning villages, causes people to lose their livelihoods. This situation created a facum of power and uncultivated agricultural land, which prompted the birth of PDK in response to the DI/TII movement in Southeast Sulawesi.

Keywords: DI/TII Movement, Society, History, Teluk Bone

Abstrak

Penelitian ini membahas gerakan DI/TII di Teluk Bone pada 1953-1965 dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil kajian menemukan Teluk Bone, yang menghubungkan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, menjadi pusat gerakan DI/TII karena didorong oleh faktor demografis dan hubungan historis penduduknya. Keterlibatan Suku Bajo dalam gerilya laut di perairan Teluk Bone memperkuat pergerakan tersebut. Aktivitas DI/TII tidak hanya terbatas di daratan, tetapi juga di perairan Teluk Bone, yang menyebabkan serangkaian kejadian penghadangan, pembajakan, dan pembunuhan terhadap ABK kapal, serta berkurangnya aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dampaknya, seperti pembakaran perkampungan, menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Situasi ini menciptakan facum of power dan lahan pertanian yang tidak tergarap, yang mendorong lahirnya PDK sebagai respons terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara.

Kata kunci: Gerakan DI/TII, Masyarakat, Sejarah, Teluk Bone

ملخص

تناقش هذه الدراسة حركة دار الإسلام/الجيش الإسلامي الإندونيسي في خليج بوني في الفترة 1953 حتى 1965 باستخدام منهج البحث التاريخي التي تشمل الاستدلال والنقد والتفسير والتأريخ. وخلصت نتائج الدراسة إلى أن خليج بوني الذي يربط بين سولاويسي الجنوبية سولاويسي الشرقية أصبح مركز حركة دار الإسلام/الجيش الإسلامي الإندونيسي لأنها كانت مدفوعة بعوامل ديموغرافية وعلاقة تاريخية لسكانه. وقد عزز انخراط قبيلة باجو في

*Corresponding author

Submit: 25 February 2024 Revised: 4 April 2024 Accepted: 20 June 2024 Published: 30 June 2024

حرب العصابات البحرية في مياه خليج بوني هذه الحركة. لم تقتصر أنشطة الحركة على البر الرئيسي فحسب، بل امتدت أيضًا إلى مياه خليج بوني، مما أدى إلى سلسلة من الكمائن وعملية اختطاف وقتل طواقم السفن وانخفاض أنشطة الشحن والتجارة. وتسببت الآثار المترتبة على ذلك، مثل حرق القرى، في فقدان الناس لمصادر رزقهم. خلق هذا الوضع فراغاً في السلطة وأراضي زراعية غير مزروعة، مما أدى إلى إنشاء الحزب الديمقراطي الإندونيسي كرد فعل لحركة الحركة الديمقراطية/حركة التحرير في سولاويسي الجنوبية سولاويسي الجنوبية الشرقية.

الكلمات المفتاحية: حركة دار الإسلام/الجيش الإسلامي الإندونيسي، المجتمع المحلي، التاريخ، خليج بوني.

PENDAHULUAN

Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan menarik perhatian pemerintah RI, terutama setelah penggabungan pasukan Qahhar Mudzakkar dengan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1950. Penggabungan tersebut diharapkan dapat memperoleh dukungan lebih banyak dari mayoritas muslim di Sulawesi Selatan. Namun, pada tahun 1953, gerilyawan DI/TII semakin terdesak oleh operasi TNI, menyebabkan pembelotan yang melemahkan gerakan tersebut. Kelemahan ini mendorong Qahhar Muddzakkar dan anggotanya untuk memasuki wilayah Sulawesi Tenggara, yang dipilih karena hutan yang luas, jumlah penduduk yang sedikit, dan kondisi daratan yang mendukung perang gerilya. Sejak tahun 1953, Sulawesi Selatan menjadi basis terkuat DI/TII, yang akhirnya berakhir tahun 1965 setelah pimpinannya terbunuh di Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara.

Tulisan-tulisan tentang gerakan DI/TII di Sulawesi masih belum menyoroti wilayah Teluk Bone secara spesifik. Sebagai contoh, tulisan Barbara Sillar Harvey,¹ meskipun kaya dengan fakta-fakta dan menggunakan sumber-sumber dari berbagai pihak, lebih banyak membahas faktor-faktor penyebab pemberontakan secara umum, termasuk pengaruh TNI yang meningkat dan dampaknya terhadap peran gerilyawan. Penelitian lain oleh Anhar Gonggong,² dengan pendekatan Sosial-Budaya, menekankan bahwa latar belakang pemberontakan tidak hanya terbatas pada faktor politik, militer, dan ideologi, tetapi juga mempertimbangkan unsur budaya seperti "Siri Na Pesse". Studi terakhir oleh C. Van Dijk³ menyoroti faktor-faktor yang saling berhubungan dalam memicu pemberontakan, termasuk persaingan antara tokoh militer dari berbagai etnis dan periode penting tahun 1950. Meskipun demikian, belum ada penelitian khusus yang membahas gerakan DI/TII di wilayah Teluk Bone. Sementara kajian Abd Rahman Hamid,⁴ dengan pendekatan sejarah maritim, belum secara spesifik mengeksplorasi gerakan DI/TII di kawasan Teluk Bone.

Berdasarkan ulasan di atas, studi ini mengkaji gerakan DI/TII di kawasan Teluk Bone dan sekitarnya selama periode 1953-1965. Dalam upaya merekonstruksi masa lalu, fokus kajian mencakup penyelidikan terhadap dasar gerakan DI/TII di Teluk Bone selama periode tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan Teluk Bone dalam struktur organisasi DI/TII dari tahun 1953 hingga 1965. Selain itu, penelitian juga menyoroti kehidupan masyarakat di Teluk Bone selama masa gerakan DI/TII yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri empat tahap: *pertama*, heuristik atau pengumpulan sumber-sumber tertulis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, yang tersimpan dalam inventaris Arsip Muhammad Saleh Lahade, Arsip Provinsi Sulawesi 1950-1960, Arsip Bone, dan Arsip Sulawesi Tenggara. Untuk memperkaya analisa data maka digunakan pula kajian-kajian terdahulu yang relevan dengan topik ini. *Kedua*, kritik untuk menemukan autentikan dan kredibilitas sumber sejarah. *Ketiga*, interpretasi atau penafsiran terhadap fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. *Keempat*,

¹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII* (Grafitipers, 1989).

² Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak* (Yogyakarta: Ombak, 2004).

³ Cornelis Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

⁴ Abd. Rahman Hamid, "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)" (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2004); Abd. Rahman Hamid, "Pelayaran Perahu Dan DI/TII Di Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 1953-1965)," *Lensa Budaya* 2, no. 1 (2007): 85-104.

historiografi yakni penyusunan fakta sejarah menjadi suatu kisah secara kronologis, kausalitas, dan imajinatif.⁵

PEMBAHASAN

A. Kondisi Keamanan

Mulai tanggal 10 Agustus 1953 seluruh daerah TT IV. TII berlaku “Hukum Syari’at Islam dalam Masa Perang”. Atas dasar itu, DI/TII mengajak segenap warga NRII, dan terutama yang beragama Islam wajib turut serta dalam pertahanan negara untuk melaksanakan rencana pertahanan rakyat secara total.⁶ Pada 8 hingga 23 September 1956, resimen TT V Brawijaya Infanteri 17 Batalyon 518 melaksanakan operasi di daerah pantai Babana Sampano hingga Boneputih dengan kode Garuda. Operasi ini dipimpin oleh Kapten Rusdijanto dengan kekuatan 48 orang termasuk satu peleton piomir. Kompi senapan I dipimpin oleh Lts. Soetadji, Kompi senapan II oleh Lts. Satino, dan Kompi senapan IV oleh Lts. Sowerjo. Operasi bertujuan untuk pemulihan keamanan di lokasi konsentrasi DI/TII di Luwu, dari pantai Palopo menuju Lattalla melalui Babana Sampano, Ongkowe, Boneputih, Labelang, Laloa, dan Latalla. Pasukan TNI terlibat dalam beberapa pertempuran. Menggunakan Kapal Naiko, Kdo Garuda dan Kompi Senapan I berangkat ke Babana Sampano, bertemu dengan Kompi Senapan II yang tiba lebih dulu. Kdo Garuda dan Kompi Senapan kemudian menyusuri pantai menuju Boneputih. Setelah berlabuh di Boneputih, Kompi IV mengirim peleton dari Kompi I untuk patroli di Bua. Dalam perjalanan ke Labellang, pasukan melihat gerombolan DI/TII dan terlibat baku tembak.

Pada pukul 14.00, pasukan TNI tiba di Laloa dengan aman dan bergabung kembali dengan Kompi II serta pasukan Garuda setelah peleton Gevechts-patrouillie dari Bua, semakin mempersulit pasukan DI/TII. Pasukan berkemah dan bermalam sambil mengadakan patroli keamanan untuk menjaga situasi tetap kondusif di bawah Infanteri 518 TNI. Dipimpin oleh Kdo OP (STT. V), pasukan Garuda bergerak menuju titik serangan di Latalla 3, dengan Kompi II sebagai voorpits, menyusuri sungai Latalla 2 dari selatan hingga menduduki Latalla dengan aman. Setelah konsolidasi, Infanteri 518 TNI melakukan patroli di sekitar Latalla 3 Complex. Pada pukul 13.00, peleton CV patroli di bawah pimpinan Sersan Soeselo melihat beberapa orang yang diduga gerombolan melarikan diri dan menembaki mereka. Peleton kembali dengan aman pukul 15.30. Atas perintah Kdo OP, pasukan menuju Lalo’a lewat Latalla 2 sambil membersihkan Bua Complex, kemudian meninggalkan Bua menuju Boneputih pukul 16.00 bersama Kdo OP. Mereka berkemah dan bermalam sebelum kembali ke pangkalan semula di Palopo pukul 02.00.

Operasi TNI dengan kode pasukan Garuda berjalan sukses tanpa kerugian bagi Batalyon Infanteri 518. Setelah kapal Naiko merapat di perairan Palopo, pasukan kembali ke pangkalan dengan aman. Kerugian pihak DI/TII meliputi dua personel tewas, empat kalong minyak tanah dibakar, 196 rumah dan pos pengawas dibakar, 20 perahu dihancurkan, serta berbagai alat disita atau rusak. Jumlah mesiu yang digunakan adalah: Kdo C.P (30 butir), Kompi I (120 butir), Kompi II (215 butir). Berdasarkan laporan gerakan operatif Brawijaya Resimen Infanteri-17 Batalyon-518, operasi pembersihan di daerah kekuatan DI/TII di Luwu mengakibatkan bergesernya anggota DI/TII yang selamat ke Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 1956, Teritorium V Brawijaya SS II Batalyon Infanteri 501 melakukan operasi di daerah Songka dekat Siwa (Wajo), di mana sekitar 250 anggota gerombolan DI/TII turun dari Rantebala dan bermarkas di desa Tallang (Enrekang). Gerombolan ini merencanakan pengadangan antara Larompong dan Suli (Luwu) serta gangguan terhadap pos-pos TNI. Pasukan Abdul Qahar Mudzakkar, yang merupakan voorpost dari Kaili (Sulawesi Tengah), terdesak oleh Angkatan Perang TNI dan meninggalkan Rantebala (Luwu). Operasi Batalion Infanteri 501 di desa Tallang dan sekitarnya bertujuan membersihkan daerah konsentrasi DI/TII.⁷ Singkatnya, pasukan DI/TII di Sulawesi Selatan terdesak dan mencari pertahanan di Sulawesi Tenggara, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, lahan sawah tidak tergarap dengan baik, dan perputaran ekonomi terganggu.

Berdasarkan laporan Oktober 1956, wilayah Kabupaten Luwu sejak 28 April 1952 dinyatakan dalam keadaan perang, dan Kdo. Sektor III, Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan Tenggara (DPSST), menjalankan operasi militer Siaga Operasi (SO). Dalam segi politik dan sosial ekonomi, pejabat sipil dan polisi bekerja

⁵ Abd Rahman Hamid and M. Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 51–53.

⁶ Arsip Muhammad Saleh Lahade (1953-1957), 191.

⁷ Arsip Muhammad Saleh Lahade, 191.

sama melalui Koordinasi Keamanan Kabupaten (KKK). Pada Oktober 1956, terdapat 82 gangguan keamanan, meningkat menjadi 93 kasus pada November 1956. Gangguan oleh gerombolan DI/TII terutama di Sub Sektor (SS) II Belopa dan SS IV Masamba-Malili meliputi pembakaran rumah, penculikan, dan pembunuhan. Patroli TNI yang teratur mengurangi gangguan DI/TII, memungkinkan perluasan lingkaran kesejahteraan. Namun, kesulitan membimbing masyarakat dalam pertanian hanya berhasil di SS III (Makale-Rantepao). SS I (Palopo) dan SS II (Belopa) serta SS IV (Masamba) masih belum sempurna akibat meningkatnya aktivitas DI/TII.

Dalam rangka mengkondusifkan situasi keamanan dan memperluas kesejahteraan, bantuan militer dari Angkatan Darat (AD) disesuaikan dengan pertimbangan faktor ekonomi dan politik. Ini bertujuan agar rencana perbaikan dan pemerintahan sipil berjalan lancar. Pengawasan pembuatan jalan dan jembatan, serta perondaan terhadap rakyat yang bekerja di ladangnya, dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas. Selain itu, pengiriman bahan pokok seperti gula, minyak, obat-obatan, garam, dan beras ke daerah bekas konsentrasi DI/TII yang sudah kondusif juga dilakukan sebagai bagian dari kerjasama antara pemerintah sipil dan AD.⁸

Berdasarkan laporan kapala Distrik Kalisusu pada tanggal 25 Januari 1962, yang ditujukan kepada pemerintah sipil dan pos Brigade Mobile, Kompi 5153 di Ereke, terungkap adanya sengketa lahan pertanian antara gerombolan DI/TII dan masyarakat. Gerombolan DI/TII mengklaim kepemilikan semua pohon kelapa di Distrik Kalisusu, melarang masyarakat untuk memanfaatkannya, sehingga menghambat penghasilan ekonomi khususnya kopra. Mereka bahkan mengambil kopra dengan kapal sampan besar untuk kebutuhan gerilya. Salah satu anggota, Arsjat, menggunakan senjata saat aksinya. Dampaknya, kemajuan masyarakat terhambat, aset mereka dikuasai, dan hubungan dengan pemerintah setempat terputus. Distrik Kalisusu di bawah Dati II Muna sangat menderita secara ekonomi akibat pendudukan DI/TII di daerah tersebut.⁹

Sejak awal berdirinya gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara, terutama di daerah Rumbia, gangguan-gangguan serius terjadi. Masiri, Imam Distrik Rumbia pada tanggal 28 April 1954, melaporkan adanya gangguan pada pekerjaannya sejak bulan Oktober 1953. Gerilyawan bersenjata DI/TII mengakibatkan kesulitan bagi pemerintah sipil dalam menjalankan tugasnya. Pusat DI/TII di daerah BambaEa, salah satu konsentrasi utama mereka, menunjuk masyarakat sebagai kepala Djawatan Agama untuk menekan mereka agar patuh. Kepala Djawatan Agama, seperti Hadji Muhammad, menggunakan kekejaman untuk memaksa masyarakat menuruti keinginan DI/TII. Mereka mendatangi masjid dengan senjata, memberi penerangan agama Islam, dan membuat perjanjian dengan masyarakat. Masyarakat yang melanggar, seperti tidak melaksanakan sholat lima waktu atau memberi informasi kepada pemerintah atau TNI, diancam akan ditembak oleh gerilyawan DI/TII.

Pada tahun 1953, kekosongan keamanan di Distrik Rumbia karena absennya kehadiran TNI dari Kendari memungkinkan gerilyawan DI/TII untuk menunjukkan keberadaan mereka di perkampungan. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengikut dan simpati masyarakat dengan berbagai cara. Pertama, mereka masuk ke kampung bersenjata dan menggertak penduduk untuk memperoleh dukungan. Sistem pemerintahan di Distrik Rumbia saat itu dikuasai oleh DI/TII, yang juga mengendalikan urusan pernikahan dan pengumpulan zakat, mengganggu pemasukan imam Distrik Rumbia yang ditugaskan oleh pemerintah sipil. Kedatangan pasukan TNI dari Kendari mengurangi aktivitas DI/TII di Rumbia, meningkatkan rasa aman masyarakat, namun pendudukan sebelumnya menyebabkan kemiskinan karena kepala keluarga yang terlibat meninggalkan keluarga mereka.

Situasi di daerah tersebut sangat mencekam bagi masyarakat karena takut akan gerilyawan DI/TII, yang menyebabkan berkurangnya jumlah orang yang pergi ke mesjid dan bahkan beberapa pegawai syara melarikan diri. Pada suatu malam Jumat, saat bulan puasa tanggal 10 Ramadan, Hadji Wahid, Komandan Batalion DI/TII, memberi penerangan di mesjid Taubonto yang dihadiri oleh masyarakat setempat. Sementara itu, gerombolan DI/TII berkumpul di Benteng Taubonto setelah datang dari Pasanggerahan Taubonto, dengan 75 gerilyawan dan 25 pengikut yang belum bersenjata. Hadji Wahid sangat diawasi ketika masuk untuk melaksanakan ibadah sholat, dengan mesjid yang dikelilingi pasukan DI/TII yang siap menembakkan senjata bren jika terjadi gangguan. Akibatnya, beberapa mesjid kosong karena pegawai syara melarikan diri, seperti di Kasiputeh, BambaEa, Larete, Laure, dan Pulo Tambakau. Masyarakat lebih memilih

⁸ Arsip Muhammad Saleh Lahade, 191.

⁹ Arsip Pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara Vol II (1960-1964), 259.

tinggal di tempat pengungsian karena merasa lebih aman, dan jika ingin solat berjamaah, para anggota TNI menjadi imam.¹⁰

Pada tahun 1955, gerombolan DI/TII berkumpul di Kabupaten Bone, yang termasuk dalam wilayah WK II Be 40.000. Menurut laporan kepala Distrik Tanete Riattang (Bone), masyarakat di sekitar Bajoe dilarang menjual ikan hasil tangkapan mereka kepada pengepul dari kota Watampone. Larangan ini mengakibatkan kurangnya ruang gerak bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan ekonomi, karena tidak hanya ikan, tetapi juga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, tidak boleh dijual ke kota. Ancaman ini menyebabkan perbincangan di KKK Bone untuk mencari solusi terhadap masalah keamanan yang muncul akibat aktivitas gerombolan tersebut.¹¹

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa selama masa pemberontakan DI/TII, kondisi keamanan di Teluk Bone tidak kondusif. Serangan-serangan dari DI/TII dan TNI sering terjadi, membuat masyarakat enggan beraktivitas sehari-hari. Anggota DI/TII sering melakukan penjarahan dan pembakaran perkampungan, mengurangi penghasilan ekonomi masyarakat. Wilayah konsentrasi DI/TII menjadi medan pertempuran, dengan korban dari kalangan umat Islam, tanpa pandang usia atau jenis kelamin. Rumah-rumah dibakar, dan hak-hak milik masyarakat Islam yang bukan anggota DI/TII dirampas. Konflik ini merugikan masyarakat secara luas, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan ketakutan yang meluas di tengah-tengah mereka.¹²

Kawasan perairan Kabaena dan pulau Talaga, baik Kecil maupun Besar, sering menjadi sasaran operasi. Pada 1 Desember 1953, sekitar 60 gerombolan melakukan pemberontakan. Mereka tiba dari arah kampung Donggala (Kabaena) menggunakan tiga perahu Pajala. Setibanya di pantai, mereka berlari ke darat sambil menembaki warga dan mengumpulkan mereka di satu tempat. Beberapa gerombolan merampok barang-barang milik warga, sementara yang lain tetap berjaga di tempat pengumpulan. Sebelas warga menjadi korban perampokan, dengan total kerugian mencapai Rp 8.160. Selain itu, perlengkapan sekolah juga dirampas, termasuk buku dan alat tulis dari lemari yang dirusak. Pagi harinya, sekitar pukul 07.00, perahu Lombo milik seorang warga Binongko tiba di kampung Talaga dari arah barat. Setelah mengambil muatan perahu tersebut, gerombolan memindahkannya ke perahu Pajala mereka. Sekitar pukul 18.00, mereka kembali ke kampung Donggala dengan tiga perahu Pajala dan satu perahu Lambo yang mereka tawan.¹³

Konsentrasi gerombolan DI/TII di Sulawesi Tenggara menyulitkan kelangsungan hidup masyarakat, terutama para petani yang kesulitan melakukan aktivitas pertanian karena persebaran gerombolan di daratan menghambat kegiatan pertanian. Lahan-lahan pertanian menjadi terbengkalai, menyulitkan perdagangan maritim karena sulitnya mendapatkan muatan hasil bumi lokal. Transportasi, terutama di daerah yang menjadi sasaran operasi gerombolan, menjadi sulit dilakukan, terutama dengan kondisi ruang samudera di bawah kontrol gerilyawan. Para petani berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke daerah-daerah yang memiliki pusat pertahanan militer, seperti Kendari dan Bau-Bau di Buton, atau ke Muna. Namun, situasi keamanan di Muna semakin memburuk, memaksa sebagian masyarakat mengungsi ke Bau-Bau. Hal ini membuat Bau-Bau menjadi pusat pengungsian bagi masyarakat kepulauan di Sulawesi Tenggara, menyebabkan kekosongan di beberapa daerah dan pemadatan penduduk di daerah tertentu, terutama di daerah yang sering diserang oleh gerombolan DI/TII atau yang jauh dari kendali keamanan.¹⁴

B. Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan

Pada masa awal, interaksi dalam pelayaran dan perdagangan sering kali mengakibatkan konflik, tetapi juga sering terjadi kerjasama dalam bentuk persekutuan dan persahabatan. Hal ini memungkinkan hubungan antar suku bangsa, terutama dalam perdagangan, dapat berjalan lancar. Perdagangan pada awalnya didasarkan pada pertukaran barang, dipicu oleh kebutuhan masing-masing komunitas akan barang-barang tertentu. Sebagai contoh, penduduk pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk pantai, sementara

¹⁰ Arsip Propinsi Sulawesi Rahasia (1946-1960), 539.

¹¹ Arsip Pemerintah Daerah Bone Vol I, (1922-1959), 1315.

¹² Arsip Propinsi Sulawesi Rahasia (1953-1955), 519.

¹³ Abd Rahman Hamid, *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 189-190.

¹⁴ Hamid, *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia*, 199-200.

penduduk pantai memerlukan hasil hutan dari penduduk pedalaman. Dalam perdagangan antar pulau, kemampuan berlayar sangat diperlukan, baik dalam hal pembuatan perahu atau kapal sebagai sarana transportasi maupun dalam hal pengetahuan navigasi untuk mencapai tujuan.¹⁵

Situasi keamanan di Indonesia antara tahun 1950-an hingga 1960-an diwarnai oleh berbagai kemelut politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu gejolak yang mencuat adalah gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Abdul Qahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara dari 1953 hingga 1965. Hal ini menciptakan ketegangan di wilayah tersebut, terutama dengan munculnya gerakan Permesta (1957-1961),¹⁶ yang semakin memperburuk situasi keamanan. Gerilyawan DI/TII tidak hanya beroperasi di darat, tetapi juga di laut. Konsentrasi Batalyon 22 DI/TII di perairan Kabaena dan pantai selatan Selayar mengganggu jalur pelayaran antara kawasan timur dan barat Indonesia. Selama periode ini, pasukan DI/TII melakukan serangkaian tindakan kekerasan, tidak hanya terhadap perahu di perairan, tetapi juga terhadap perkampungan penduduk di pinggir pantai. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa karena keselamatan harta dan jiwa mereka tidak terjamin.¹⁷

Pelabuhan-pelabuhan di Teluk Bone memiliki peran penting sebagai pusat pengumpulan dan pelabuhan penunjang bagi jalur pelayaran di daerah tersebut, mendukung hubungan perdagangan antara Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pedagang, pelaut, dan nelayan dari berbagai daerah di Teluk Bone menjalin hubungan perdagangan dengan daerah-daerah seperti Palopo, Balanipa, Selayar, Wajo, Pallima, Malili, Ponrang, Siwa, Kajang, dan Larompong di Sulawesi Selatan, serta Kendari, Buton, Kabaena, Poleang, Tiworo, Tinanggae, Kolono, dan BambaEa di Sulawesi Tenggara. Khususnya, pedagang pribumi cenderung fokus pada perdagangan antarpulau, menunjukkan kekhususan dalam aktivitas perdagangan mereka.

Pada 8 Agustus 1953, Panglima TII. TT. IV, Komando Pasukan Hasanuddin, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keadaan perang sejak 10 Agustus 1953. Pernyataan tersebut memerintahkan seluruh lapisan masyarakat RII, terutama umat Islam, untuk bergabung dalam perang dan melaksanakan pertahanan secara total. Perekrutan tenaga manusia dari warga setempat, terutama orang Bajo, menjadi krusial dalam mendukung gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara.¹⁸ Dalam struktur DI/TII, mobilitas penting terjadi dalam gerilya laut, di mana perolehan perahu sering dilakukan dengan kekerasan. Konsentrasi pasukan DI/TII di perairan menimbulkan ketakutan besar bagi para pelaut karena sering terjadi penghadangan, perampokan, dan pembunuhan di perairan. Tindakan kekerasan tersebut merupakan metode yang digunakan oleh DI/TII untuk memperoleh sumber daya ekonomi di perairan dan meningkatkan mobilitas gerilya laut.¹⁹

Pasukan DI/TII menggunakan senjata yang dipasok dari Sulawesi Selatan melalui penyelundupan dengan perahu. Pada awal November 1953, ALRI berhasil menangkap beberapa perahu dari Teluk Bone sebelah timur yang diduga menyelundupkan persenjataan untuk pasukan DI/TII di Sulawesi Tenggara; perahu-perahu tersebut kemudian dibawa ke Kolaka dan Kendari untuk diperiksa. Praktik penyelundupan ini sudah terjadi sejak awal pembelotan Abdul Qahar Mudzakkar pada tahun 1950 dan berlanjut hingga munculnya DI/TII, dengan senjata yang diselundupkan dari Singapura dan Malaysia melalui pelabuhan Pare-Pare di bawah kendali Andi Selle. Namun, hubungan DI/TII dengan Malaysia mengalami kemunduran setelah peristiwa konfrontasi Malaysia, karena patroli dan pemeriksaan di pelabuhan-pelabuhan, baik di Indonesia maupun Malaysia, dilakukan dengan ketat, sehingga penyelundupan senjata dan barang-barang menjadi tidak mungkin terjadi.²⁰

¹⁵ Adrian Bernard Lopian, *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX* (Depok: Komunitas Bambu, 2009), 80.

¹⁶ Taufik Ahmad, "Permesta Dan Gerakan Otonomi Daerah 1957-1960," *Walusuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 4, no. 1 (2013): 161-169.

¹⁷ Hamid, "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)," 133-134.

¹⁸ Abd Rahman Hamid, "Pengembaraan Orang Bajo Di Laut Nusantara," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2013): 121-131.

¹⁹ Hamid, "Pelayaran Perahu Dan DI/TII Di Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 1953-1965)," 85-104.

²⁰ Hamid, "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)," 161.

Konsentrasi gerombolan DI/TII di perairan membawa perubahan signifikan terhadap pelayaran Nusantara, terutama di kawasan Teluk Bone yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Perampokan dan penghadangan yang sering dilakukan oleh gerombolan DI/TII berdampak buruk pada pelayaran dan perdagangan di kawasan tersebut. Penjarahan di perairan Siwa (antara Luwu dan Wajo) oleh gerombolan DI/TII terhadap perahu "Minasa Madina" pada tahun 1957, yang membawa balok kayu ke Makassar, menjadi titik balik. Berdasarkan laporan kepala Distrik Dangkala, setelah kejadian itu, kapal-kapal jarang masuk ke perairan Siwa (Teluk Bone) selama sekitar enam bulan. Lalu lintas pelayaran menjadi sepi, menyebabkan pelabuhan sunyi dan perdagangan terganggu. Hanya sesekali ada kapal yang berlayar, sehingga pelabuhan-pelabuhan di Makassar dan Bajo menjadi jarang dikunjungi pedagang.²¹

Pada tahun 1958, terjadi penghadangan terhadap sebuah perahu asal Tomia milik La Suknae yang sedang berlayar dari Maluku menuju Gresik, Surabaya. Saat melintasi Selat Selayar, perahu ini dikejar oleh gerombolan DI/TII. Karena angin berhembus pelan dan samudra teduh, perahu bergerak lambat dan berhasil didekati oleh gerombolan yang kemudian naik ke atas perahu dan mengambil alih kemudi, membawa perahu ke pesisir Bulukumba. Seluruh muatan dan awak perahu ditahan selama tiga bulan, di mana para awak dipaksa bekerja melayani kepentingan gerombolan, seperti mengangkat air. Mereka tidak bisa melawan karena ditahan di markas utama DI/TII, dan diancam akan dibunuh jika melawan. Suatu malam, La Suknae mendengar percakapan dalam bahasa Bugis yang menyiratkan bahwa para awak perahu akan dieksekusi keesokan harinya. Namun, sekitar pukul 04.00 dini hari, tentara menyerang markas gerombolan. Melihat situasi yang berubah, para awak segera mengamankan diri dan melaporkan keberadaan mereka kepada pihak keamanan di lokasi. Perahu tersebut kemudian dijual kepada seorang warga di Bulukumba, dan para awak dibawa ke Makassar. Beberapa hari kemudian, mereka ikut berlayar ke Wakatobi dan akhirnya tiba di kampung halaman mereka.²²

Gerakan DI/TII di perairan memudahkan Abdul Qahar Mudzakkar memperoleh barang selundupan. Dengan berhasil membangun teritorial dan hubungan dagang dengan dua bekas anggota CTN yang kini menjadi penguasa perang TNI, Andi Selle dan Andi Sose, operasi setempat terhadap dirinya tidak akan dilakukan di daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Khususnya Andi Selle, yang ditempatkan di daerah pantai dekat Pare-Pare dan Polewali (Mandar), menyediakan sumber senjata dan persediaan yang stabil karena ia selalu siap menjual kepada penawar tertinggi dan bersedia barter selama ia mendapat bagian. Pare-Pare adalah pelabuhan lama untuk penyelundupan, dekat dengan daerah penghasil kopra, dan memiliki akses dekat ke Kalimantan, Tawao, dan bahkan Singapura. Tersebar desas-desus bahwa setelah diangkat menjadi komandan RI-23 di Pare-Pare tahun 1957, Andi Rifai tidak menentang penjualan senjata kepada Abdul Qahar Mudzakkar. Beberapa anggota TNI yang berjiwa dagang juga diberitakan menyewakan senjata mereka kepada DI secara mingguan. Ada desas-desus tentang bantuan luar negeri untuk Abdul Qahar Mudzakkar, termasuk kapal selam misterius di Teluk Bone, kontak dengan Duta Besar DI Hasan Tiro di Amerika Serikat, dan janji bantuan dari Inggris. Satu-satunya bukti yang tidak terbantahkan adalah kesediaan para pejabat Inggris di Tawao, Kalimantan Utara (Sabah), untuk mengabaikan penyelundupan dagang besar-besaran yang berlangsung di depan mata mereka.²³

Pada dasarnya, Abdul Qahar Mudzakkar adalah seorang pedagang, sebagaimana perjalanan hidupnya sebelum memimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Salah seorang komandan bawasanya, Abdul Wahid, juga memainkan peranan penting di bidang perdagangan dengan jaringan di Makassar dan Surabaya. Amien Larekeng, komandan pasukan lainnya, menguasai perdagangan kopra melalui Sulawesi Tenggara, Makassar, dan Surabaya. Sitti Hami, isteri keempat Abdul Qahar Mudzakkar yang menetap di pedalaman Sulawesi Tenggara, dikenal sebagai pedagang kaya dengan jaringan perdagangan hasil bumi yang luas di Sulawesi Selatan dan Tengah. Perdagangan, yang dianggap penting untuk mobilisasi dana gerakan, memperoleh perhatian khusus dari Abdul Qahar Mudzakkar. Hal ini terbukti dari kesaksian Bahar Mattilioe tentang pembentukan badan usaha oleh Abdul Qahar Mudzakkar, yaitu Usaha Rahasia Khusus Organisasi Revolusi (URCOS).²⁴

²¹ Arsip Pemerintah Daerah Bone Vol I (1957), 1294.

²² Hamid, *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia*, 193-194.

²³ Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*, 207.

²⁴ Gonggong, *Abdul Qahar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*, 111-112.

Gerombolan DI/TII menjalin kerja sama dengan Kepala Distrik Runjani untuk memuluskan usaha penyelundupan dan perdagangan mereka. Anggota gerombolan menggunakan stempel yang sama dengan yang digunakan pemerintah sipil, seperti stempel Kepala Distrik Runjani, untuk berdagang agar pedagang di daerah lain mudah percaya dan membeli barang-barang hasil jarahan mereka. Mereka menggunakan stempel ini untuk memuluskan perdagangan, terutama di daerah Jawa, Sunda Kecil (NTT, NTB, Bali). Namun, setelah penggunaan stempel tersebut diketahui oleh pihak berwajib, stempel tersebut segera dicabut. Selanjutnya, dinyatakan bahwa selama daerah tersebut masih dikuasai oleh Gerombolan DI/TII, stempel Distrik Runjani tidak berlaku dalam perdagangan.²⁵

Jenis perahu yang digunakan oleh pasukan DI/TII untuk mobilitas gerilya antar pulau jarak dekat adalah perahu Jarangka (perahu bercadik). Perahu ini berbentuk memanjang, ramping, dan dilengkapi dengan layar besar yang memungkinkannya berlayar dengan kecepatan tinggi, sehingga oleh gerilyawan disebut sebagai "kapal pemburu." Selain itu, pasukan DI/TII juga menggunakan perahu tradisional lainnya, seperti Pajjala dan Soppe, untuk mendukung mobilitas gerilya laut. Kedua perahu tersebut memiliki kapasitas antara 1-3 ton. Meskipun ukurannya lebih besar dari perahu Jarangka, namun lebih kecil dari Lombo. Dari segi bentuk, Soppe lebih ramping dibandingkan Pajjala, sehingga berdampak pada kecepatan yang lebih tinggi dan kelincahan. Beberapa jenis perahu ini digunakan oleh pasukan DI/TII untuk melakukan mobilitas gerilya laut di kawasan Kabaena dan sekitarnya.²⁶

Tindakan perampokan yang disertai kekerasan dan pembunuhan oleh gerombolan DI/TII mengakibatkan terjadinya vacuum of power di daerah-daerah konsentrasi mereka. Hal ini membuat pemerintah sipil enggan melaksanakan tugas di distrik-distrik tersebut karena tidak adanya pihak keamanan yang menjaga. Terkonsentrasinya DI/TII di perairan juga meningkatkan kecemasan dan kegelisahan para pelayar, sehingga sebagian dari mereka lebih memilih "cuti" atau berhenti berlayar sementara daripada menghadapi ancaman di perjalanan. Meskipun demikian, kegiatan pelayaran dan perdagangan tidak berhenti sepenuhnya. Sebagian pelayar memutuskan untuk berlayar dengan menempuh dua cara: pertama, berlayar pada malam hari, terutama ketika melewati tempat-tempat konsentrasi DI/TII; kedua, menggunakan rute alternatif di luar pulau yang biasanya digunakan. Kedua cara ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung dengan DI/TII di wilayah perairan, karena jika terjadi, keselamatan perahu, harta benda, dan jiwa mereka terancam.²⁷

C. Kehidupan Sosial

Setelah bergesernya konsentrasi DI/TII ke kawasan Sulawesi Tenggara melalui Teluk Bone, keadaan masyarakat di Sulawesi Selatan, terutama bekas markas Resimen I DI/TII di Kabupaten Luwu, mulai pulih. Masyarakat kembali ke kampung-kampung yang dulunya menjadi tempat konsentrasi DI/TII di daerah Luwu. Prakarsa pemerintah sipil, khususnya DPSST, dengan memasang alat-alat negara untuk melakukan patroli setiap hari di daerah-daerah yang sebelumnya diduduki oleh DI/TII, menghambat perluasan gerak pasukan DI/TII di wilayah tersebut. Kondisi yang mulai kondusif dimanfaatkan oleh pemerintah sipil untuk memperluas lingkaran kesejahteraan rakyat. Mereka kembali membimbing rakyat dalam bercocok tanam di Luwu dan meningkatkan pertanian. Kerja sama antara masyarakat, militer, dan pemerintah sipil penting untuk kemajuan ekonomi daerah tersebut. Pihak militer memberikan bantuan agar rakyat merasa aman dari ancaman, sehingga kehidupan sosial masyarakat kembali kondusif. Rencana pembangunan lingkaran kesejahteraan dapat berjalan lancar berkat pengawalan pembuatan jalan dan jembatan yang dirusak oleh DI/TII, perondaan militer terhadap petani yang bekerja di sawah dan ladang, serta kelancaran konvoi bahan pokok antardaerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh militer.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 tahun 1954, surat keputusan Perdana Menteri No. 148/PM/1954, dan surat keputusan Koordinasi Keamanan Daerah (KKD) Propinsi Sulawesi No. KKD/337/1954, tujuan utama adalah membantu penyelesaian masalah keamanan umum. Langkah pertama adalah membuat peraturan dan tindakan keamanan yang relevan. Langkah kedua adalah membantu

²⁵ Arsip Pemerintah Daerah Bone Vol I (1955), 1314.

²⁶ Hamid, "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)," 145.

²⁷ Hamid, "Pelayaran Perahu Dan DI/TII Di Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 1953-1965)," 85-104.

pengungsi yang memberikan informasi tentang kondisi di tempat pengungsian. Organisasi Pagar Desa (OPD) diaktifkan dari 12 November hingga 12 Desember 1956 dengan dana dari KKK Luwu (2% ekspor pertanian). Dilakukan latihan OPD oleh 71 orang dengan biaya Rp. 33.000 dan pengadaan pakaian senilai Rp. 75.000. Kerja sama antara pemerintah sipil, rakyat, dan TNI membantu kembalinya aktivitas pertanian yang ditinggalkan selama masa gerilyawan DI/TII. Meskipun masih ada gerombolan DI/TII di daerah Luwu yang tak tersentuh TNI, kehadiran lembaga OPD, didukung oleh KKK dan diawasi oleh Kdo. DPSST, menghambat aksi gerombolan. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasakan dampak psikologis dari tindakan gerombolan DI/TII.²⁸

Terkonsentrasinya gerombolan DI/TII di Sulawesi Tenggara, khususnya di perairan, sangat mengganggu keamanan rakyat di wilayah tersebut, seperti yang dialami oleh masyarakat Distrik Kalisusu di Pulau Buton, termasuk daerah Dati II Muna. Berdasarkan laporan kepala Distrik Kalisusu pada 25 Januari 1962 No 45/Rahasia, gangguan tersebut meliputi beberapa tindakan. Pertama, gerombolan DI/TII mengklaim semua pohon kelapa di Distrik Kalisusu sebagai milik mereka dan melarang rakyat memungut buah kelapa, dengan ancaman ditembak jika melanggar. Kedua, mereka merampok kopra milik rakyat sebanyak satu sampan besar dengan menggunakan perahu (Koli-koli). Ketiga, salah satu anggota gerombolan bernama Arsijat diketahui membawa sepucuk pistol. Keempat, tindakan DI/TII ini menghambat kemajuan ekonomi rakyat dengan menguasai hasil laut dan bumi mereka. Kelima, rakyat dilarang berhubungan dengan pihak pemerintah maupun militer, apalagi memberitahukan keberadaan gerombolan DI/TII.²⁹

Sulawesi Tenggara, khususnya Kewedanan Kolaka sebelah barat, berbatasan dengan Kewedanan Malili di daerah Luwu (Bugis). Hal ini mempertegas alasan Abdul Qahar Mudzakkar memilih daerah Kolaka sebagai tempat pergeseran markasnya yang kemudian menjadi markas DI/TII Resimen II. Sementara itu, sebagian penduduk asli daerah ini, terutama orang-orang Bugis-Bone, mengungsi ke daerah-daerah yang dikuasai oleh DI/TII di Poleang, berjumlah sekitar 4.000 jiwa dan menempati daerah Rakadua. Mereka termasuk dalam kategori warga markas yang hidup dan menghidupi pasukan DI/TII Kompi IV Batalyon 22, yang beroperasi di perairan Kabaena dan sekitarnya (Teluk Bone).³⁰

Konsentrasi DI/TII di Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Kolaka dan Poleang Rumbia, berpusat di desa Boepinang yang menjadi Korem II DI/TII di bawah pimpinan Mappiare Dg Mananrang, seorang suku Bugis. Di Boepinang, pasar malam pernah diadakan dan bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 1 Agustus 1948. Pengibaran bendera tersebut dipelopori oleh J.C. Rumbajan, yang saat itu bekerja pada Kepala Distrik Poleang. Akibat pengibaran ini, J.C. Rumbajan menjadi buronan KNIL dan melarikan diri ke Bone dan kemudian ke Makassar. Nasibnya tidak diketahui, apakah berhasil melarikan diri atau terbunuh oleh KNIL. Pelarian J.C. Rumbajan menyebabkan kekacauan di Sulawesi Tenggara, karena anak buahnya menggabungkan diri dengan gerombolan DI/TII, sehingga menimbulkan kerusuhan di daerah tersebut.³¹

Guna pemulihan keamanan di daerah konsentrasi DI/TII, pemerintah sipil berusaha mendekati anggota-anggota gerombolan. Di Kolaka Utara, camat Batupute mengunjungi kecamatan Batupute, salah satu tempat konsentrasi DI/TII di desa Wawo, pada tanggal 10 September 1962, bersama kepala-kepala jawatan sejumlah sekitar 20 orang menggunakan perahu. Namun, usaha ini tetap menghadapi hambatan dari pihak gerombolan DI/TII, terutama dari Batalyon 20 di bawah pimpinan Mayor M. Ali Kamry, yang mengomandoi gerakan DI/TII di daerah Tolala hingga Towari Kolaka. M. Ali Kamry berusaha menghalangi kunjungan camat Batupute, yang diperintahkan untuk tidak datang berkelompok dan tidak membawa nama Pemerintah Indonesia, khususnya di daerah de facto DI/TII. Kunjungan camat Batupute tersebut bertujuan menemui keluarganya, tetapi M. Ali Kamry menyatakan bahwa Abdul Qahar Mudzakkar sedang bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Jusuf, dan pihaknya tidak mengetahui apa yang dibahas antara DI/TII dan TNI.³²

Ketika Camat Batupute bersiap untuk menjalankan tugasnya di daerah de facto militer DI/TII, M. Ali Kamry, pimpinan Batalyon 20 DI/TII, berusaha mencegahnya. Ia segera menghubungi Dan Dim 1422

²⁸ Arsip Muhammad Saleh Lahade (1953-1957), 191.

²⁹ Arsip Pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara Vol II (1960-1964), 259.

³⁰ Hamid, "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)," 158.

³¹ Arsip Muhammad Saleh Lahade (1953-1957), 191.

³² Arsip Sulawesi Selatan Tenggara Vol II (1961-1962), 261.

Haulileo Kolaka agar mencegah kedatangan camat Batupute ke daerah de facto DI/TII. M. Ali Kamry berusaha meyakinkan Dan Dim 1422 H.O untuk menunda pergerakan tambahan dari pemerintah demi menjaga keamanan dan menghargai kesepakatan antara DI/TII dan TNI, yang menyatakan bahwa tidak ada pihak yang saling mendahului di daerah de facto TII. Jika camat Batupute tetap menjalankan tugasnya di daerah tersebut, pemerintah akan memicu kembali pertentangan yang sempat mereda antara DI/TII dan TNI.³³

Dengan adanya kepastian tempat persembunyian Abdul Qahar Mudzakkar, pasukan Operasi Kilat pun mengatur penyerangan terhadap sasaran itu. Persiapan dilakukan pada jam 16.00 sore tanggal 2 Februari, dan penyerangan dimulai pada jam 03.00 subuh. Penyerangan berlangsung dengan cepat di tengah desing-desing peluru dari kedua belah pihak. Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi melihat seseorang yang memegang granat tangan meloncat dari sebuah gubuk. Ternyata itu adalah Abdul Qahar Mudzakkar. Awalnya, anggota penyergap berniat menangkapnya hidup-hidup, tetapi maksud itu diurungkan karena sasarannya menggenggam granat tangan. Kopral Sadeli dengan cepat membidik dan menembak Abdul Qahar Mudzakkar, yang jatuh dan meninggal. Mayatnya dijemput oleh Panglima XIV/Hasanuddin dan Komandan Operasi Kilat Andi Muhammad Jusuf, yang bertanggung jawab atas operasi militer ini. Abdul Qahar Mudzakkar, pimpinan utama DI/TII dan presiden (Khalifah) Negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII), akhirnya meninggal dunia, tidak mampu menghadapi operasi militer yang terbaik koordinasinya dari yang pernah dihadapinya.³⁴

Setelah berakhirnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dan Tenggara, terutama di kawasan Teluk Bone yang awalnya diproklamasikan pada 7 Agustus 1953, yang berkuasa hampir selama lebih dari 12 tahun, berakhir setelah pimpinan DI/TII, Abdul Qahar Mudzakkar, tertembak dan meninggal pada 2 Februari 1965, ditempat persembunyiannya di tepi Sungai Lasolo Kendari, Sulawesi Tenggara. Faktor-faktor yang melemahkan pergerakan DI/TII antara lain: pertama, adanya pertentangan dalam kubu Abdul Qahar Mudzakkar, terutama antara Abdul Qahar Mudzakkar dan Hamid Ali, yang mengakibatkan melemahnya kekuatan gerilyawan kedua pihak yang bertentangan, dengan masing-masing menghadapi dua kubu yang berselisih. Kedua, adanya keputusan sepihak yang diambil oleh Abdul Qahar Mudzakkar sendiri, di mana dalam kubu Abdul Qahar Mudzakkar tidak menyetujui adanya peralihan program pergantian dari TKR ke DI/TII, tetapi kembali kepada program-program utama TKR. Ketiga, pemusatan kekuatan gerombolan Abdul Qahar Mudzakkar di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang disebar untuk menghancurkan objek-objek penting di seluruh medan, sehingga mengakibatkan kekuatan anggota gerilyawan Abdul Qahar Mudzakkar terbagi-bagi. Hal ini mempermudah anggota TNI dalam menghadapi gerombolan DI/TII secara efisien, karena titik konsentrasi DI/TII terbagi-bagi. Sehingga gerilyawan kesulitan berhadapan secara terbuka (frontal), yang menyulitkan perhubungan antara titik-titik daerah konsentrasi DI/TII dalam pergeseran secara frontal darat maupun laut, begitu pun sulitnya pihak DI/TII mendapat pemberitaan.³⁵

KESIMPULAN

Konsentrasi DI/TII di kepulauan Sulawesi pada masa gerombolan tersebut merambah hampir setiap daerah kecamatan yang ada, menggerakkan mobilitas dan aktivitas di seluruh jazirah Sulawesi Selatan dan Tenggara. Teluk Bone, sebagai wilayah perairan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut, menjadi pusat aktivitas gerakan DI/TII yang didorong oleh faktor demografis dan hubungan historis antara penduduk di wilayah tersebut. Keterlibatan Suku Bajo dalam aksi gerilya laut di perairan sekitar Teluk Bone turut memperkuat pergerakan tersebut. Teluk Bone termasuk dalam struktur DI/TII Resimen I Sulawesi Selatan, yang masuk dalam Kresidenan Sulawesi Timur di bawah kendali acting residen Sjamsul Bahri. Daerah-daerah seperti Luwu, Bone, dan Buton memiliki peran strategis dalam pertahanan dan pengorganisasian wilayah. Kabupaten Luwu dan Bone, serta Sulawesi Tenggara, masing-masing masuk dalam wilayah pertahanan yang ditetapkan. Perincian brigade dan daerah-daerah aksi gerombolan DI/TII seperti Batu Putih di Luwu, Be 40.000 di Bone, dan Kolaka sebagai daerah Resimen II, mencerminkan strategi dan pengorganisasian yang ketat dalam pergerakan DI/TII.

³³ Arsip Sulawesi Selatan Tenggara Vol II (1961-1962), 261.

³⁴ Gonggong, *Abdul Qahar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*, 174-175.

³⁵ Arsip Muhammad Saleh Lahade (1953-1957), 191.

Berkonsentrasinya gerakan DI/TII tidak hanya di daratan tetapi juga di perairan, terutama di sekitar Teluk Bone, menyebabkan serangkaian kejadian penghadangan, pembajakan, dan pembunuhan terhadap ABK kapal serta berkurangnya aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dampaknya merambah ke ekonomi masyarakat dengan terjadinya pembakaran perkampungan dan kehilangan mata pencaharian. Untuk mengatasi situasi tersebut, dibentuklah KKK di bawah kepemimpinan Kdo DPSST untuk menangani pengungsian dan pemulihan keamanan. Keadaan tersebut menciptakan kekosongan *vacuum of power* dan lahan pertanian yang tidak tergarap, mendorong lahirnya PDK sebagai respons terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR ACUAN

- Arsip Pemerintah Daerah Bone Vol I (1922-1959), 1285, 1292, 1293, 1294, 1314, 1415.
- Arsip Pribadi Muhammad Saleh Lahade (1953-1957), 187, 191.
- Arsip Provinsi Sulawesi Rahasia (1953-1955), 519.
- Arsip Provinsi Sulawesi Tenggara Vol II (1960-1962), 252, 259, 261.
- Ahmad, Taufik. "Permesta Dan Gerakan Otonomi Daerah 1957-1960." *Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya* 4, no. 1 (2013): 161-169.
- Van Dijk, Cornelis. *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Gonggong, Anhar. *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Hamid, Abd. Rahman. "Gangguan Keamanan Di Sulawesi Tenggara Pada Masa DI/TII (Studi Di Pulau Kabaena Dan Perairan Sekitarnya 1953- 1965)." Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2004.
- . "Pelayaran Perahu Dan DI/TII Di Perairan Kabaena Sulawesi Tenggara 1953-1965." *Lensa Budaya* 2, no. 1 (2007): 85-104.
- Hamid, Abd Rahman. *Orang Buton: Suku Bangsa Bahari Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- . "Pengembaraan Orang Bajo Di Laut Nusantara." *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 4, no. 2 (2013): 121-131.
- Hamid, Abd Rahman, and M. Saleh Madjid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Harvey, Barbara Sillars. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*. Grafitipers, 1989.
- Lapian, Adrian Bernard. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009.